

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu Laut Cina Selatan menjadi isu yang hangat di dunia internasional, karena sejak tahun 1947 hingga saat ini, Laut Cina Selatan memegang peran yang penting dalam berjalannya perekonomian negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut tersebut, yakni Indonesia, Singapura, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina.¹ Tidak hanya kaya akan sumber daya alam, Laut Cina Selatan juga merupakan jalur perdagangan yang strategis karena menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Cina mengklaim haknya atas perairan ini secara historis sejak beberapa abad yang lalu dari bagian utara Laut Cina Selatan hingga mencapai pesisir Cina. Dewasa ini, Beijing mengklaim lebih dari 95 persen Laut Cina Selatan dan mengandalkan wilayah tersebut untuk jalur perdagangan, karena laut ini merupakan pintu masuk impor minyak mentah untuk Cina sebesar 85 persen. Cina juga melakukan klaim terhadap pulau-pulau kecil yang berada di Laut Cina Selatan dan telah membangun hampir 1.300 hektar lahan sebagai infrastruktur dalam menopang sebagian besar infrastruktur militer.²

Kekayaan sumber daya alam di Laut Cina Selatan memicu reaksi dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut tersebut dengan melakukan klaim terhadap wilayah-wilayah di laut itu sebagai miliknya sehingga berpotensi

¹ Pete Cobus, "Konflik dan Diplomasi di Laut," *VOA*, tersedia dari <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>, diakses pada 22 Februari 2019.

² *Ibid.*

menciptakan konflik, maka dari itu terdapat beberapa faktor tentang pentingnya Laut Cina Selatan. *Pertama*, apabila dilihat dari sisi geografis, Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Cina berada pada ribuan kilometer dari daratan Cina sendiri, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan, seperti apa kepentingan Cina terhadap Laut Cina Selatan.³ *Kedua*, Laut Cina Selatan menjadi perebutan negara-negara di kawasan tersebut karena Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan yang strategis dan menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, sekaligus juga sebagai pendorong perekonomian dalam perdagangan di Asia Timur, di mana 85% impor energi Cina dan suplai minyak untuk Jepang dan Korea melewati wilayah perairan ini, serta 55% hasil produk dari India yang diperdagangkan dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik harus melewati jalur Laut Cina Selatan yang menuju ke Cina, Jepang, Korea, dan Amerika Serikat.⁴ *Ketiga*, banyaknya sumber daya alam yang berada di dalam Laut Cina Selatan terutama di Pulau Spratly dan Pulau Paracel berupa gas dan minyak yang banyak.⁵ Dengan demikian masing-masing negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan saling mempertahankan kedaulatan mereka di wilayah perairan tersebut.

Klaim yang dilakukan oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan menimbulkan kekhawatiran, tidak hanya bagi negara pengklaim seperti Cina, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Vietnam, tetapi juga

³ Pete Cobus, "Konflik dan Diplomasi di Laut," *VOA*, tersedia dari <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>, diakses pada 22 Februari 2019.

⁴ Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, Idris, "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan tersebut," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 48, no.1 (2018), hal. 22-26.

⁵ *Ibid.*

dengan negara yang tidak mengklaim seperti Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Konflik di Laut Cina Selatan muncul ketika Cina mulai mengklaim seluruh bagian dari wilayah laut tersebut termasuk Pulau Spratly dan Pulau Paracel.⁶ Meningkatnya kekhawatiran negara-negara ini terjadi ketika adanya kegiatan militer dan adu kekuatan angkatan bersenjata, serta perilaku agresif yang dilakukan oleh Cina dalam menekan negara-negara yang turut serta mengklaim wilayah Laut Cina Selatan.⁷ Hal ini membuat negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan berupaya untuk menglegitimasi wilayah tersebut dan juga menentang atas klaim Cina terhadap wilayah Laut Cina Selatan.

Filipina menentang Cina secara sepihak atas klaim yang dilakukan terhadap Laut Cina Selatan, karena Filipina memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut. Pertentangan yang terjadi antara Filipina dan Cina mulai memuncak pada tahun 1994 pada masa pemerintahan Presiden Fidel Ramos. Filipina memberikan pengajuan berupa tuntutan kepada Mahkamah Arbitrase melalui Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang setelahnya ditandatangani oleh 60 negara, dengan tuntutan yang diajukan oleh pihak Filipina bersisi tentang wilayah perairan, landasan kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Semenjak pertengahan tahun 1990, Cina telah menjadi ancaman bagi Filipina di dalam sengketa Laut Cina Selatan, sehingga menyebabkan Filipina mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan militer negaranya di dalam

⁶ Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, Idris, "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan tersebut," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 48, no.1 (2018), hal. 22-28.

⁷ Ibid.

menjaga kedaulatan wilayahnya di laut tersebut. Tahun 1995 persetujuan semakin memanas ketika Cina secara jelas membangun penampungan untuk para nelayan di *Mischief Reef*, yang kemudian dikecam oleh pihak Filipina dan memberikan protes melalui *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*.⁸

Pada masa pemerintahan Benigno Aquino III, Filipina menyikapi klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan dengan sangat tegas dan konsisten. Filipina pada masa Aquino memiliki kecenderungan untuk meminta bantuan dalam bidang keamanan dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu terpenting dari Filipina. Adanya penandatanganan *Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA)* menjadi bentuk dari kerja sama kedua negara ini.⁹ Presiden Aquino melakukan kerja sama tersebut untuk melemahkan dan mengurangi pengaruh Cina di Laut Cina Selatan, serta kerja sama ini membantu Aquino dalam memperoleh peningkatan keamanan dan pertahanan Filipina.

Hubungan kerja sama di dalam bidang militer antara kedua negara tersebut mempunyai sejarah yang panjang, di mana terdapat *Visiting Forces Agreement (VFA)* yang ditandatangani pada tahun 1999. Melalui perjanjian tersebut, Filipina memperoleh bantuan dari Amerika Serikat di dalam bidang militer untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negaranya dari ancaman.¹⁰ Perjanjian ini membuat kemampuan dan kekuatan militer Filipina meningkat, karena adanya pelatihan

⁸ Katong Ragawi Numadi, "Kebijakan Filipina Era Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte Terhadap Klaim 9 *Dash Line* Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, vol. 7, no. 3 (Desember 2018), hal. 251-253.

⁹ Ibid.

¹⁰ Mark Anthony M. Velasco, "The Visiting Forces Agreement (VFA) in the Philippines: Insights on Issues of Sovereignty, Security and Foreign Policy," *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, vol. 3, no. 4 (November 2015), hal. 82-84.

bersama dengan tentara Amerika Serikat yang berada sementara di Filipina, tujuannya untuk memberikan peningkatan di dalam peralatan persenjataan dan pelatihan.¹¹ Maka dari itu kekuatan yang dimiliki oleh Filipina tidak dapat terlepas dari keberadaan dan campur tangan dari pihak Amerika Serikat.

Hubungan militer yang dimiliki oleh Filipina dan Amerika Serikat, mengarahkan Aquino untuk menjalankan kerja sama EDCA. Bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat berupa pengiriman tentara ke Filipina, dan Filipina memberikan izin kepada militer Amerika untuk mengakses kembali pangkalan militer di Filipina dengan tujuan untuk membantu menjalankan pengawasan terhadap dinamika Laut Cina Selatan.¹² Hal ini membuat Filipina membuka kembali pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina yang sebelumnya ditutup pada masa pemerintahan Corazon Aquino tahun 1991.

Strategi berikutnya yang dilakukan pada masa kepemimpinan Aquino adalah membawa sengketa dengan Cina ini ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda pada bulan Januari 2013.¹³ Mahkamah Arbitrase memberikan keputusan pada tanggal 12 Juli 2016 terhadap tuntutan yang dilakukan oleh Filipina mengenai sengketa Laut Cina Selatan, berisi tentang klaim Cina berdasarkan hak historis yang berhubungan dengan wilayah maritim di Laut Cina Selatan dengan nama *nine-dash*

¹¹ John Paul Obillos Dela Rosa, "Deontic modals in RP-US Visiting Forces Agreement (VFA): A corpus-based analysis," *Journal of Language and Linguistic Studies*, vol. 13, no. 2 (2017), hal. 355-361.

¹² Katong Ragawi Numadi, "Kebijakan Filipina Era Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte Terhadap Klaim 9 Dash Line Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, vol. 7, no. 3 (Desember 2018), hal. 251-253.

¹³ Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, Idris, "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 48, no.1 (2018), hal. 30-35.

line bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982.¹⁴ Walaupun Filipina memenangkan gugatan, Cina menolak dan tidak mengakui keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Arbitrase karena keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat, sehingga penolakan dari Cina memengaruhi hubungan dengan Filipina. Hal ini akan menyebabkan ketegangan di masa mendatang yang akan dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Namun demikian, ketika pergantian presiden dari Benigno Aquino III ke Rodrigo Duterte, hubungan antara Filipina dan Cina mengalami perubahan, di mana terdapat respon yang sangat bertolak belakang antara Aquino dan Duterte dalam menyikapi klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan. Duterte mengutamakan peningkatan bentuk kerja sama bilateral antara Filipina dan Cina untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di Laut Cina Selatan.¹⁵ Duterte melakukan kerja sama dengan Cina karena Filipina tidak mempunyai fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai.¹⁶ Duterte ingin menghentikan ketergantungan Filipina dengan Amerika Serikat, karena Duterte melihat kebangkitan dari negara-negara yang mempunyai pengaruh besar di dunia internasional, seperti Cina, membuat Amerika Serikat sudah tidak mempunyai kapabilitas sebagai negara adidaya.¹⁷ Hal

¹⁴ Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, Idris, "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan tersebut," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 48, no.1 (2018), hal. 30-35.

¹⁵ Katong Ragawi Numadi, "Kebijakan Filipina Era Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte Terhadap Klaim 9 *Dash Line* Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, vol. 7, no. 3 (Desember 2018), hal. 251-253.

¹⁶ "Filipina Berubah 180 Derajat Soal Sengketa Laut China Selatan," *Jakarta Greater*, 9 Juli 2016, tersedia dari <https://jakartagreater.com/filipina-berubah-180-derajat-soal-sengketa-laut-china-selatan/>, diakses pada 17 Januari 2020.

¹⁷ Shintia Ramadani dan Sofia Trisni, "Analisis Kebijakan Luar Negeri Filipina Terkait Sengketa Laut China Selatan Pada Masa Duterte," *Journal of International Studies*, vol. 4, no. 3 (November 2019), hal. 47-53.

ini menjadi pertimbangan dari Duterte untuk tidak bergantung lagi kepada Amerika Serikat dan menjadikan Cina sebagai sekutu barunya.

Perbedaan antara kedua pemimpin tersebut dapat dilihat dari kebijakan politik luar negerinya. Benigno Aquino III menjalankan kebijakan politik luar negeri yang lebih konfrontatif, di mana terdapat bentuk kerja sama dengan Amerika Serikat dalam meningkatkan pertahanan dan militer Filipina untuk menekan Cina, serta melalui jalur hukum dengan membawa sengketa ini ke Mahkamah Arbitrase pada tahun 2013. Rodrigo Duterte lebih menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bersifat damai, di mana Filipina melakukan kerja sama bilateral dengan Cina di dalam mengelola sumber daya di Laut Cina Selatan. Maka dari itu, apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, penulis ingin membahas tentang perubahan kebijakan politik luar negeri antara Presiden Benigno Aquino III dan Presiden Rodrigo Duterte untuk menjaga kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan dan mengidentifikasi faktor dibalik perubahan kebijakan dari masing-masing presiden tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam permasalahan yang terjadi antara Filipina dengan Cina dalam perebutan kedaulatan di Laut Cina Selatan yang menciptakan ketegangan dan kekhawatiran bagi Filipina, menjadikan permasalahan sengketa ini menjadi penting karena harus diatasi dengan efektif. Pemerintah Filipina dibawah pemerintahan Presiden Benigno Aquino III menggunakan strategi yang konfrontatif untuk menekan Cina, serta melalui jalur hukum internasional. Presiden Rodrigo Duterte

mengambil langkah damai dan keputusan yang strategis dalam mengatasi sengketa dengan Cina melalui hubungan kerja sama, hal tersebut karena Duterte ingin menjaga kedaulatan Filipina, karena jika kerja sama yang dijalani kedua negara tidak strategis dan menguntungkan, maka dapat melemahkan kedaulatan Filipina. Maka dari itu, terbentuklah beberapa rumusan masalah dalam tulisan ini yang akan penulis jawab, yaitu:

1. Apa perbedaan strategi politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Benigno Aquino III ke Rodrigo Duterte dalam menyikapi klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan?
2. Mengapa kedua strategi politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Presiden Benigno Aquino III ke Rodrigo Duterte berbeda dalam menyikapi klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Maka dari itu perebutan kedaulatan di Laut Cina Selatan antara Filipina dengan Cina dalam masa pemerintahan Benigno Aquino III dan Rodrigo Duterte menjadi hal utama bagi penulis dalam membentuk tulisan ini. Tujuan pertama penulis adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh kedua pemimpin tersebut di dalam menjaga kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Penulis juga mengidentifikasi perubahan dan perbedaan kebijakan dari Presiden Benigno Aquino III sampai Rodrigo Duterte. Adanya perbedaan kebijakan antara kedua pemimpin ini mengarahkan kepada tujuan kedua penulis, yaitu untuk mengetahui latar belakang pengambilan strategi politik luar negeri masing-masing pemimpin.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan. Maka dari itu, penulis berharap dalam tulisan yang telah dibentuk dapat berguna bagi pembaca dalam memahami permasalahan yang terjadi dalam perebutan kedaulatan antara Filipina dengan Cina dari dua sudut pandang pemimpin yang berbeda dan mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan melalui strategi politik luar negeri yang digunakan oleh kedua pemimpin untuk menjaga kedaulatan Filipina terhadap perebutan sengketa di Laut Cina Selatan.

1.5. Sistematika Penulisan

Setelah menyelesaikan penulisan ini, maka terdapat sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

:

Pada bagian ini penulis melakukan pembahasan mengenai latar belakang masalah, batasan dan fokus utama penelitian dalam rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

:

Pada bagian ini penulis menjelaskan landasan teori dan semua konsep yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini juga berisi hasil tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

:

Pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai pendekatan ilmiah dengan metode yang dipakai, dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN :

Pada bagian ini penulis menjelaskan hasil penelitian yang telah didapat dari kumpulan data yang kemudian akan di analisa dan dibahas menggunakan teknik analisis yang sudah ditentukan. Bagian ini akan menjawab rumusan masalah dengan menggunakan hasil-hasil penelitian yang telah didapat dari berbagai sumber yang diikuti dengan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN :

Pada bagian ini berisi kesimpulan akhir dari seluruh penelitian yang menjelaskan secara singkat hasil penelitian yang didapat, yang diikuti dengan penyampaian keterbatasan penelitian serta memberikan saran untuk penelitian berikutnya.

